

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN
MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
(Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

**NOLAN ARBI
NPM : 2021020214**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)



**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

**TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYAH TERHADAP
IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 5
TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN
MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN
(Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat -
Syarat Guna Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Ilmu Syariah

Oleh :

**NOLAN ARBI
NPM : 2021020214**

Program Studi : Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*)

**Pembimbing I : Dr. Iskandar Syukur, M.A
Pembimbing II : Dr. Edi Susilo, M.H.I**

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
1445 H / 2024 M**

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB INDONESIA

Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	-	16	ط	ṭ
2	ب	b	17	ظ	ẓ
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث	ṣ	19	غ	g
5	ج	j	20	ف	f
6	ح	ḥ	21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ	ẓ	24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	هـ	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص	ṣ	29	ي	y
15	ض	ḍ			

Vokal Pendek	Vokal Panjang	Diftong
كَتَبَ = kataba	قَالَ = qāla	كَيْفَ = kaifa
سُئِلَ = su’ila	قِيلَ = qīla	حَوْلَ = ḥaula
يَذْهَبُ = yaẓhabu	يَقُولُ = yaqūlu	

ABSTRAK

Dinas Perhubungan memiliki tugas pokok yakni untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah dibidang perhubungan berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara dalam mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Rumusan masalah dalam penelitian yaitu (1) Bagaimana implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara? (2) Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara? Tujuan penelitian ini untuk mengetahui implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara dan untuk mempelajari bagaimana tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) yang bersifat deskriptif kualitatif, sumber data yang diperoleh berupa data primer dan data skunder melalui teknik wawancara dan dokumentasi untuk kemudian dilakukan pengolahan dan analisis data.

Hasil penelitian mengemukakan bahwa implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan belum terlaksana secara optimal. Hal ini dibuktikan dengan adanya rambu-rambu lalu lintas yang tidak dilakukan perawatan sehingga hilang sebagian fungsi sebagai sarana yang berguna bagi masyarakat dan kerusakan pada lampu lalu lintas di beberapa titik kota yang terus dibiarkan. Dalam tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan belum sesuai

dengan *siyasah tanfidziyyah*. Hal ini dikarenakan kurangnya perhatian pemerintah dalam meniadakan kemudharatan bagi masyarakat sebagaimana yang terdapat dalam kaidah *fiqhiyah* yakni *al-Dhararu Yuzalu*.

Kata Kunci : *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, Peraturan Daerah, Manajemen Lalu Lintas Jalan.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nolan Arbi
NPM : 2021020214
Jurusan : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*TINJAUAN FIQH SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4 PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2001 TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN LALU LINTAS JALAN (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun sanduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Bandar lampung, 13 Mei 2024
Penulis,



Nolan Arbi
NPM .2021020214



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PERSETUJUAN

**Judul Skripsi : TINJAUAN Fiqh SIYASAH TANFIDZIYAH
TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 4
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
LAMPUNG UTARA NOMOR 5 TAHUN 2001
TENTANG PELAKSANAAN MANAJEMEN
LALU LINTAS JALAN (Studi Dinas
Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)**

Disusun Oleh : Nolan Arbi

NPM : 2021020214

Program Studi : Hukum Tata Negara

MENYETUJUI

**Untuk di munaqosahkan dan di pertahankan dalam sidang Munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung**

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

Dr. Iskandar Syukur, M.A

NIP. 196603301992031002

Dr. Edi Susilo, M.H.I

NIP. 198707102020121004

**Mengetahui,
Ketua Jurusan Hukum Tata Negara**

Frenki, M.Si

NIP. 198003152009011017



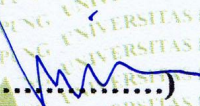
**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH**

Alamat : Jl. Letkol H. Endro Suratmin Sukarame Bandar Lampung Telp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“Tinjauan *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)”** disusun oleh, **Nolan Arbi, NPM : 2021020214**, Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*), Telah di ujikan dalam sidang Munaqosah di Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung Pada Hari/Tanggal, Rabu 12 Juni 2024

TIM PENGUJI

Ketua : **Dr. Fathul Mu'in, S.H.I., M.H.I** (.....)

Sekretaris : **Erik Rahman Gumiri, M.H** (.....)

Penguji I : **Agustina Nurhayati, S.Ag., M.H** (.....)

Penguji II : **Dr. Iskandar Syukur, M.A** (.....)

Penguji III : **Dr. Edi Susilo, M.H.I** (.....)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Efa Rodiah Nur, M.H
NIP. 195908081993032002

MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat”.

(Q.S. An-Nisa’ [4] : 58)



PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas berkat dan rahmatnya yang telah memeberikan nikmat sehat, kekuatan dan masih diberikan kesabaran yang luar biasa untuk penulis sehingga penulis dapat mengerjakan skripsi ini hingga selesai. Sebagai tanda bukti serta cinta dan juga kasih sayang yang sangat dalam, izinkan saya mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua penulis, ayahanda dan ibunda tercinta yaitu Bapak Sarnubi dan Ibu Umi Selama yang telah memebrikan motivasi, pengorbanan, kasih sayang dan juga doa yang tulus dan ikhlas kepada penulis. Untuk ayahanda dan ibunda tercinta terimakasih atas semua yang telah diberikan, telah merawat, mendidik menjaga dan menyekolahkanku hingga jenjang Strata 1 semoga kalian selalu dalam penjagaan Allah SWT.
2. Untuk saudara saudari penulis yaitu Novi Sarmiyanti, Novan Saputra, Nova Alda Yanti, Nurlela, dan Nila Septiyana yang sangat penulis sayangi dan banggakan.
3. Seluruh keluarga besar yang selalu mendukung dan memberikan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Penulis bernama lengkap Nolan Arbi, lahir pada tanggal 04 Maret 2002 di Kotabumi Lampung Utara, bertempat tinggal di Kotabumi Selatan, kelurahan Kelapa Tujuh, anak keempat dari enam bersaudara dari pasangan Bapak Sarnubi dan Ibu Umi Selama.

Penulis mengawali pendidikan dimulai dari Sekolah Dasar Negeri 06 Kelapa Tujuh Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2008 dan lulus pada tahun 2014, kemudian melanjutkan ke jenjang Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 10 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2014 dan lulus pada tahun 2017. Selanjutnya melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Kejuruan di SMK Negeri 01 Kotabumi Lampung Utara pada tahun 2017 dan lulus pada tahun 2020.

Pada tahun 2020 penulis melanjutkan Pendidikan Perguruan Tinggi di Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, mendaftar pada jenjang Strata Satu (S1) terdaftar sebagai Mahasiswa pada Fakultas Syari'ah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar'iyah*).

Bandar Lampung, 13 Mei 2024

Nolan Arbi
NPM .2021020214

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, serta shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul : “Tinjauan *Fiqh Siyasa* *Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara)” Dalam rangka menyelesaikan persyaratan kegiatan perkuliahan terakhir, penulis menyusun skripsi ini di Fakultas Syariah Prodi Hukum Tata Negara (*Siyasa Syar’iyyah*) Program Strata Satu (S1) UIN Raden Intan Lampung.

Penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat berjasa sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, untuk itu rasa terimakasih penulis sampaikan atas bantuan berbagai pihak yang diantaranya adalah:

1. Prof. H. Wan Jamaluddin Z, M.Ag.,Ph.D Selaku Rektor UIN Raden Intan Lampung.
2. Dr. Efa Rodiah Nur, M.H. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
3. Bapak Frenki, S.E.I., M.Si, selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara.
4. Dr. Iskandar Syukur, M.A Selaku Pembimbing I dan Dr. Edi Susilo, M.H.I Selaku Pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, memberikan bimbingan, arahan, dan motivasinya kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
5. Seluruh Dosen Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan selama penulis menempuh pendidikan.

6. Bapak dan Ibu Staf Karyawan Perpustakaan Fakultas Syariah dan Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung.
7. Bapak dan Ibu di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara yang telah membantu dan memberikan izin penelitian kepada penulis.
8. Calon pendamping hidup penulis Annisa Jamil Syarifah yang selalu memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung.

Demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Semoga Allah memberikan balasan pahala yang berlimpah atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Bandar Lampung, 13 Mei 2024

Nolan Arbi
NPM .2021020214

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	ii
ABSTRAK	iii
SURAT PERNYATAAN	v
PERSETUJUAN.....	vi
PENGESAHAN.....	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN.....	ix
RIWAYAT HIDUP	x
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang	2
C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian.....	6
D. Rumusan Masalah	7
E. Tujuan Penelitian.....	7
F. Manfaat Penelitian.....	7
G. Kajian Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	8
H. Metode Penelitian.....	10
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Kajian Fiqh Siyasah.....	19
1. Pengertian Fiqh Siyasah.....	19
2. Ruang Lingkup Fiqh Siyasah	22
3. Pengertian Fiqh Siyasah Tanfidziyyah.....	27
B. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan.....	30

1. Pengertian Manajemen Lalu Lintas Jalan.....	30
2. Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam Pandangan Hukum Islam	32
3. Peran Pemerintah dalam Melaksanakan Manajemen Lalu Lintas Jalan.....	35
BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN.....	43
A. Gambaran Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.....	43
1. Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara	44
2. Visi dan Misi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara	44
3. Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara	44
4. Struktur Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara	45
B. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan	48
1. Peran Dinas Perhubungan dalam Menciptakan Ketertiban dan Keselamatan bagi Pengguna Jalan di Kabupaten Lampung Utara	48
2. Penyelenggaraan dan Prosedur Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Lampung Utara	50
3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan	55
BAB IV ANALISIS DATA	59
A. Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam Menciptakan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.....	59

B. Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam Menciptakan Ketertiban dan Keselamatan Lalu Lintas bagi Masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.....	61
--	----

BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Rekomendasi	68

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Fasilitas Penunjang Pengadaan/Perbaikan APILL (Lampu Lalu Lintas) Dishub Kabupaten Lampung Utara.....	53
2. Data Jumlah dan Kondisi Traffik Light di Kabupaten Lampung Utara	53



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat keterangan penelitian dari Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara
- Lampiran 2 : Daftar Pertanyaan
- Lampiran 3 : Dokumentasi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara / Lokasi Penelitian
- Lampiran 4 : Blanko Konsultasi dan Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Keterangan Sitasi Skripsi
- Lampiran 6 : Keterangan Turnitin Skripsi



BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal untuk memahami judul skripsi ini dan untuk menghindari kesalahpahaman, maka penulis terlebih dahulu akan memaparkan istilah-istilah yang terkandung dalam skripsi ini. Adapun judul skripsi yang dimaksud adalah Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Adapun istilah yang terdapat pada judul skripsi ini yaitu, sebagai berikut:

1. Tinjauan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Tinjauan memiliki arti sebagai hasil telaah, pandangan, pendapat yang diperoleh setelah menyelidiki suatu obyek tertentu.¹

2. *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*

Fiqh siyasah tanfidziyyah merupakan politik pelaksanaan undang-undang. Yang memiliki makna bahwa sebagai pemegang kekuasaan politik berfungsi dan mempunyai tugas membudayakan masyarakat dengan ajaran-ajaran ketuhanan. Sehingga dengan demikian, aturan-aturan, ajaran-ajaran dan nilai-nilai agama dapat ditransformasikan melalui sistem pendidikan dan pengajaran sehingga setiap warga negara memiliki budaya politik yang sama.²

3. Implementasi

Implementasi merupakan penerapan dari rancangan atau langkah yang telah disusun secara terperinci, dan dapat dilaksanakan setelah semua perencanaan dianggap sempurna. Atau dapat dikatakan bahwa implementasi yaitu bentuk aktifitas yang saling membantu pada saat proses interaksi antara tujuan

¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), 28.

² Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), 33.

dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksanaan dan birokrasi yang efektif.³

4. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Pasal 4

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Pasal 4 merupakan Peraturan Daerah yang ditetapkan oleh Bupati Lampung Utara Hairi Fasyah mengenai pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di kabupaten lampung utara.

Sedangkan pasal 4 pada Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 merupakan pasal yang membahas tentang kewajiban Dinas Perhubungan dalam hal menjalankan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan.

5. Manajemen Lalu Lintas

Manajemen lalu lintas merupakan salah satu kegiatan yang meliputi dari pengorganisasian, perencanaan, pemberian arah, serta pemantauan keadaan pergerakan lalu lintas, baik itu bagi pejalan kaki, pesepeda, dan semua tipe kendaraan.⁴

Berdasarkan penjelasan dalam penegasan judul di atas, maka dapat disimpulkan bahwa skripsi ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengetahui tinjauan fiqh siyasah tanfidziyyah terhadap implementasi pasal 4 peraturan daerah kabupaten lampung utara nomor 5 tahun 2001 tentang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di dinas perhubungan kabupaten lampung utara.

B. Latar Belakang Masalah

Kecepatan pertumbuhan perekonomian di Indonesia tentunya tidak terlepas dari sektor transportasi baik itu dari segi transportasi darat, laut dan udara. Untuk itu maka dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas khususnya pada sektor transportasi darat, negara tentunya berkewajiban memberikan kesejahteraan bagi masyarakat dengan memberikan pelayanan baik

³ Guntur Setiawan, *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan* (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), 39.

⁴ Risdiyanto, *Rekayasa Dan Manajemen Lalu Lintas Teori Dan Aplikasi* (Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014), 1.

berupa sarana maupun prasarana bagi ketertiban masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu pemerintah telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang mana di dalam undang-undang tersebut dijelaskan “Bahwa lalu lintas dan angkutan jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan umum”. Sebagaimana peraturan tersebut tentunya salah satu upaya untuk menjaga prinsip akuntabilitas penyelenggaraan negara adalah dengan cara mewujudkan keamanan, kesejahteraan, dan ketertiban berlalu lintas.

Perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas di Indonesia khususnya di wilayah kabupaten Lampung Utara merupakan salah satu faktor yang menyebabkan bertambahnya jumlah pengguna jalan khususnya pengguna kendaraan bermotor. Salah satu cara untuk mengontrol dan bentuk antisipasi dalam mencegah faktor-faktor penghambat yang dapat menimbulkan gangguan pada kelancaran jalan yakni dengan menjaga stabilitas keamanan lalu lintas. Hal ini patut diperhatikan karena transportasi darat merupakan salah satu aspek yang sangat penting serta memiliki peran tersendiri dalam mendukung perkembangan dan pertumbuhan suatu kota.⁵ Dalam hal menjaga mobilitas, efisiensi dan kualitas hidup masyarakat maka perlu diadakan yang namanya manajemen lalu lintas jalan, yang mana hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting untuk mengatasi masalah kemacetan dan kecelakaan.

Manajemen lalu lintas sendiri merupakan sebuah pendekatan yang mencakup perencanaan baik itu perencanaan geometric hingga pengoperasian lalu lintas jalan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas.⁶ Yang bertujuan untuk mengurangi kemacetan, megoptimalkan penggunaan ruang jalan dan meningkatkan efesiensi transportasi melalui peningkatan

⁵ Auliya Nurul Azizah, Anton Budiharjo, and Siti Maimunah, “KAJIAN MANAJEMEN LALU LINTAS DI KAWASAN PASAR BOGOR” 23, no. 1 (2022).

⁶Rustam, Muhammad Syarif Prasetya Adiguna, et al., *REKAYASA LALU LINTAS* (Tahta Media Group, 2023), 2.

infrastruktur dan sarana lalu lintas yang memiliki teknologi yang lebih mumpuni dalam pengaturan lalu lintas.

Merujuk pada peraturan sebelumnya, bahwa untuk terciptanya suatu tatanan lalu lintas yang tertib dan berguna bagi masyarakat maka diperlukannya suatu pengadaan manajemen pada lalu lintas jalan. Sebagaimana yang telah tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan menyatakan :

- (1) Manajemen lalu lintas dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan;
- (2) Manajemen lalu lintas dapat dilaksanakan oleh Badan Hukum dan/atau perorangan setelah mendapat persetujuan Dinas Perhubungan.⁷

Dinas Perhubungan sendiri merupakan Dinas Daerah yang memiliki tugas serta wewenang dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.⁸ Atau dapat dikatakan bahwa tugas pokok dari Dinas Perhubungan khususnya pada tingkat Kabupaten/Kota adalah untuk melakukan perumusan kebijakan teknis, penyelenggaraan umum, pengendalian dan pembinaan teknis yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.⁹

Namun pada kenyataannya masih terdapat rambu-rambu lalu lintas yang tidak dilakukan perawatan sehingga hilang sebagian fungsi sebagai sarana yang baik dan berguna bagi masyarakat, yang mana hal ini merupakan bentuk nyata bahwa belum terlaksanakannya peraturan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan di Kabupaten Lampung Utara. Dimana melalui data lapangan yang ada dan disertai masih terdapat lampu lalu lintas yang kurang

⁷ Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Manajemen Lalu Lintas Jalan.

⁸ Rahma Novia, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi, "PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG ANGKUTAN KOTA" 1, no. 7 (n.d.): 1296-1304.

⁹ Broto Priyono et al., *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan* (Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021), 108.

perawatan sehingga menyebabkan lampu lalu lintas tidak sinkron satu sama lain, durasi antara lampu merah dan hijau yang tidak akurat dan kerusakan pada lampu lalu lintas di beberapa titik kota yang terus dibiarkan. Sehingga dampak daripada itu dapat menimbulkan kemacetan di ruas jalan dan dapat menimbulkan kecelakaan baik bagi pengguna jalan maupun bagi pejalan kaki. Dan apabila melihat dari kacamata hukum Islam maka salah satu kaidah *fiqhiyah* yakni *al-Dhararu Yuzalu* “bahwa setiap kemudaratan harus segera dihilangkan” dapat dikatakan belum terealisasi secara utuh dalam permasalahan di atas.

Pada penelitian ini kajian *Fiqh Siyash* yang digunakan adalah *Siyash Tanfidziyyah*. *Siyash Tanfidziyyah* dapat diartikan sebagai politik atau lembaga yang melaksanakan suatu perundang-undangan.¹⁰ Atau dapat diartikan juga bahwa *Siyash Tanfidziyyah* sendiri merupakan suatu aturan perundang-undangan yang sejalan dengan nilai-nilai syariat dan dijadikan landasan dalam hal peraturan bernegara.

Dalam *fiqh Siyash Tanfidziah* lembaga eksekutif dikenal dengan Al-Sulthah al-Tanfidziyyah yang dipimpin oleh seorang khilafah. Khilafah diciptakan Allah SWT. di muka bumi ini salah satunya sebagai pelindung, pengayom dan bertugas untuk memakmurkan jagat raya, serta termasuk menjaga dan melestarikannya. Pada dasarnya tugas manusia di muka bumi ini tidak hanya sekedar *hablu minallah wa hablu minannas*, melainkan juga harus menjadi rahmat bagi seluruh alam dan masyarakat termasuk menjaga ketertiban dunia.¹¹

Maka dari itu apabila melihat dari segi pemerintahan tugas daripada khilafah ini ialah untuk mensejahterakan umat dan mewujudkan keamanan negara. Yang mana salah satu cara agar stabilitas keamanan dapat terealisasi ialah dengan menerapkan syariat Islam dan memperteguh iman, dikarenakan stabilitas keamanan umat sangat berkaitan erat dengan keimanan, dengan kata lain apabila keimanan seorang khilafah lemah atau bahkan

¹⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyash Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 15.

¹¹ Agus Hermanto, *Fikih Ekologi* (Malang: Literasi Nusantara, 2018), 65.

tiada maka ketertiban dan keamanan pun akan terhambat. Sebagaimana firman Allah S.W.T. dalam surah Al-An'am ayat 82 :

الَّذِينَ ءَامَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَٰئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezhaliman (syirik), mereka itulah orang-orang yang mendapatkan keamanan, dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Q.S. Al-An'am [6]: 82)

Dari pemaparan di atas, penulis ingin mengangkat masalah tersebut dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Kasus Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara).

C. Fokus dan Sub Fokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti menetapkan fokus dari penelitian ini ialah untuk melihat bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan.

2. Sub Fokus Penelitian

Peneliti menetapkan sudut tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* dari fokus tersebut sebagai sub fokus penelitian yaitu Tinjauan Fiqh Siyasa Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara).

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara?
2. Bagaimana Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Fiqh Siyash Tanfidziah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

F. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, adapun manfaat penelitian dalam skripsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Berdasarkan pembahasan terhadap permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, manfaat peneliti melaksanakan penelitian ini iyalah untuk memberikan pengetahuan serta

wawasan bagi akademisi mengenai Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan, serta memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum, terutama pada Ilmu Hukum Tata Negara atau *Siyasah Syariyyah*. Selain itu juga diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

2. Kegunaan secara praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi kepada masyarakat luas terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Serta untuk memperluas *khazanah* ilmu pengetahuan bagi penulis, guna sebagai syarat untuk memenuhi tugas akhir agar dapat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian terdahulu yang relevan digunakan sebagai bahan perbandingan terhadap penelitian yang ada, peneliti menyadari bahwa secara substansi dan objek penelitian ini bukan hal yang baru, pada tinjauan pustaka ini peneliti akan mendeskripsikan beberapa karya yang relevan dengan judul penelitian ini. Sebelum peneliti menguraikan lebih lanjut, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan skripsi ini, berikut ini daftar penelitian yang penulis pakai sebagai bahan pengkajian yang berkaitan dengan penelitian ini antara lain:

1. R.A Ekie Prifitriani Ramona, “Efektivitas Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan dan Keselamatan Berlalu lintas di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Makassar. Penelitian ini membahas tentang apa saja yang menjadi faktor penghambat tidak dapat terlaksanakannya suatu peraturan di kalangan remaja.¹²

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian R.A Ekie Prifitriani Ramona adalah sama-sama membahas tentang cara meningkatkan keamanan dan keselamatan berlalu lintas bagi masyarakat. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian R.A Ekie Prifitriani Ramona dengan penelitian yang penulis kaji yaitu terletak pada tinjauan dalam penelitian, yang mana pada penelitian yang penulis kaji menerapkan tinjauannya dalam prespektif fiqh siyasah.

2. Waliyul Ahdi, “Implementasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan” Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh. Penelitian ini membahas tentang peran dan tugas pemerintah yang berwenang dalam menjalankan peraturan yakni undang-undang nomor 22 tahun 2009.¹³

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Waliyul Ahdi adalah sama-sama membahas tentang peran dan tugas dari pada pemerintah dalam menjalankan suatu undang-undang demi tercapainya keamanan dan keselamatan bagi masyarakat. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian Waliyul Ahdi dengan penelitian yang penulis kaji yaitu penelitian penulis lebih mengacu kepada peran pemerintah dalam upaya manajemen lalu lintas jalan.

3. Asdar, “Manajemen Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas di Dinas Perhubungan Kota Makasar” Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah

¹² R.A Ekie Prifitriani Ramona, “Efektivitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalulintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros” (Skripsi, Universitas Hasanudin Makasar 2014).

¹³ Waliyul Ahdi, “Implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam-Banda Aceh 2019) .

Makassar. Penelitian ini membahas tentang upaya mencegah kemacetan lalu lintas di kota makassar.¹⁴

Persamaan penelitian penulis dengan penelitian Asdar adalah sama-sama mengkaji tentang manajemen rekayasa lalu lintas yang dalam hal ini dinaungi oleh Dinas Perhubungan, yang menjadi salah satu cara efektif dalam menanggulangi faktor-faktor yang merugikan pengguna jalan. Sedangkan untuk perbedaan antara penelitian Asdar dengan penelitian yang penulis kaji yaitu penelitian Asdar lebih mengacu kepada manajemen penanggulangan kemacetan pada suatu jalan.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur atau tata cara untuk mengetahui sesuatu dengan langkah-langkah yang sistematis.¹⁵ Adapun unsur-unsur prinsip yang terkandung di dalam metode penelitian yakni terdiri dari ilmu pengetahuan; sejumlah metode, teknis dan teori; operasional; bersifat ilmiah dan dapat menjawab suatu permasalahan.¹⁶ Berdasarkan hal tersebut maka penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan sifat penelitian

a. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Menurut Denzin & Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan maksud menafsirkan fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada.¹⁷ Jadi penulis mengadakan penelitian mengenai implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten

¹⁴ Asdar, "Manajemen Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Makasar" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar).

¹⁵ Bunyana Sholihin, *Metodologi Penelitian Syari'ah* (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020), 151.

¹⁶ *Ibid*, 152.

¹⁷ Albi Anggito and Johan Setiawan, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 7.

Lampung Utara nomor 5 tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajem Lalu Lintas Jalan. Adapun objek dalam penelitian ini adalah Studi di Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sifat penelitian

Dari segi sifatnya, penelitian ini bersifat deskriptif analisis. Metode deskriptif merupakan status metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, ciri-ciri serta hubungan diantara unsur-unsur yang ada pada suatu fenomena tertentu.¹⁸

2. Data dan Sumber Data

a. Data Primer

Data primer merupakan suatu keterangan yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumbernya dan diolah sendiri oleh peneliti.¹⁹ Dalam penelitian ini data primer yang diperoleh dari wawancara kepada responden yang terdiri dari Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan Pegawai lainnya yang bersangkutan.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah salah satu bentuk data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang sebenarnya.²⁰ Dalam pengumpulan data sekunder dapat dilakukan melalui kepustakaan yang bertujuan untuk mengumpulkan data-data dan informasi dengan bantuan buku-buku yang terdapat pada perpustakaan.

¹⁸ Kaelan, M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat* (Yogyakarta: Pradigma, 2005), 58.

¹⁹ J Supranto, *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 10.

²⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004), 115.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut Margono, Metode wawancara merupakan teknik pengumpulan data atau informasi dengan cara mengajukan beberapa pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada responden, dan jawaban-jawaban responden tersebut dicatat atau direkam guna sebagai bahan penelitian.²¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpul data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini ditujukan kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara dan Pegawai lainnya yang bersangkutan.

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dengan memanfaatkan panca indra (penglihatan dan pendengaran) guna menemukan informasi terkait gejala yang sedang diamati dengan cara melalui metode pencatatan kemudian dengan catatan tersebut barulah dapat dianalisis.²²

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable berupa foto, catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan sebagainya.²³

²¹ S. Margono, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), 165.

²² Rianto Andi, *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), 70.

²³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 198.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi merupakan jumlah keseluruhan objek penelitian dari satuan-satuan atau individu-individu yang karakteristiknya hendak diteliti. Populasi dalam penelitian ini yaitu 260 orang pegawai Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara.

b. Sampel

Sampel merupakan kelompok kecil yang diamati serta merupakan bagian dari populasi sehingga sifat maupun karakteristiknya juga dimiliki oleh sampel.²⁴ Adapun cara pengambilan sampel pada penelitian ini ditentukan dengan metode *purposive sampling* yaitu penunjukan langsung dilakukan secara subjektif oleh peneliti. Jadi sampel dalam penelitian ini adalah : 1 Kasi Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Lalu lintas, 1 Seksi Pengawasan dan Pengendalian Lalu Lintas, 2 orang pegawai yang bertugas di bidang lalu lintas, dan 2 orang masyarakat di kabupaten lampung utara. Jadi sampel pada penelitian ini berjumlah 6 orang.

Pihak tersebut peneliti pilih dengan alasan karena pihak-pihak tersebut berkompeten guna memenuhi kevalidan penelitian.

5. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data menjelaskan prosedur pengolahan dan analisis data sesuai dengan pendekatan yang dilakukan. Karena penelitian ini menggunakan metode kualitatif atau lapangan, maka metode dalam pengelolaan data dilakukan dengan menguraikan data, menyusun, dan mengatur data secara efektif sehingga dapat memudahkan pemahaman. Adapun langkah-langkah yang harus diteliti yaitu:

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 173–174.

a. Pemeriksaan Data (*editing*)

Pemeriksaan data yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang akan dianalisis.

b. Klasifikasi (*classifying*)

Klasifikasi yaitu proses pengelompokkan semua data baik yang berasal dari wawancara dengan subjek penelitian, pengamatan, dan pencatatan langsung dilapangan. Seluruh data yang didapat tersebut dibaca dan ditelaah secara mendalam, kemudian digolongkan sesuai kebutuhan. Hal ini dilakukan agar data yang telah diperoleh menjadi mudah dibaca dan dipahami, serta memberikan informasi yang objektif yang diperlukan oleh peneliti.²⁵

c. Verifikasi (*verifying*)

Verifikasi adalah proses memeriksa data dan informasi yang telah didapat dari lapangan agar validitas data dapat diakui kebenarannya dan digunakan dalam penelitian.

d. Kesimpulan (*concluding*)

Yang terakhir kesimpulan, yaitu langkah akhir dari pengelolaan data. Kesimpulan ini yang nantinya menjadi sebuah data terkait dengan objek penelitian.

6. Analisis Data

Setelah data diperoleh dan dikumpulkan kemudian dilakukan analisis data. Analisis yang digunakan yakni secara deskriptif, yang mana dapat diartikan bahwa suatu prosedur penelitian yang memperoleh atau menghasilkan data kualitatif baik berupa kata-kata tertulis maupun lisan

²⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005), 104.

yang bersumber dari orang-orang dan tingkah laku yang dapat dipahami.²⁶

Analisa kualitatif digunakan dengan cara merinci serta menguraikan kalimat hingga dapat memperoleh kesimpulan yang jelas. Analisa kualitatif sendiri merupakan upaya sistematis dalam penelitian berupa pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran yang jelas dan lengkap tentang bagaimana keadaan hukum yang berlaku serta fenomena hukum tertentu yang terjadi pada suatu daerah dan lapisan masyarakat.

Sedangkan kerangka yang digunakan penulis dalam menganalisis data yakni dengan menggunakan kerangka berfikir induktif, yang mana kerangka ini diperoleh dari fakta-fakta atau peristiwa tertentu. Yang bertujuan untuk memberikan ketegasan bahwa walaupun berasal dari tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan. Namun pada dasarnya kesimpulan ini dapat digunakan sebagai kesimpulan untuk seluruh kasus yang sama di wilayah yang berbeda.

I. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini mempunyai pokok permasalahan, penulis menyusun sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab dari judul “Tinjauan Fiqh Siyasah Tanfidziyyah Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas” ini meliputi :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini penulis memaparkan mengenai Penegasan Judul, Latar Belakang Masalah, Fokus dan Sub Fokus Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian,

²⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Riset* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), 42.

Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

2. BAB II LANDASAR TEORI

Bab ini penulis memaparkan mengenai teori Pengertian *Fiqh Siyasah*, Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*, Pengertian *Fiqh Siyasah Tanfidziyyah*, uraian mengenai Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan, Pengertian Manajemen Lalu Lintas Jalan, Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam Pandangan Hukum Islam, dan Peran Pemerintah Dalam Melaksanakan Manajemen Lalu Lintas Jalan.

3. BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang profil lokasi penelitian yaitu gambaran umum Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara, Peran Dinas Perhubungan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jalan di Kabupaten Lampung Utara, Penyelenggaraan dan prosedur pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di Kabupaten Lampung Utara, Faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan di Kabupaten Lampung Utara.

4. BAB IV ANALISIS PENELITIAN

Bab ini penulis memaparkan tentang analisis terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara, dan tinjauan *fiqh siyasah tanfidziyyah* terhadap implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dalam menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat di Kabupaten Lampung Utara.

5. **BAB V PENUTUP**

Bab ini memaparkan mengenai kesimpulan dari skripsi ini dan rekomendasi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari uraian yang telah penulis jelaskan di atas, hasil penelitian tentang Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* Terhadap Implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan (Studi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara). Maka penulis menyimpulkan beberapa diantaranya:

1. Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan khususnya dalam hal menciptakan ketertiban dan keselamatan lalu lintas bagi masyarakat dan pengguna jalan sudah diimplementasikan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Pasal 4. hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya manfaat yang dirasakan oleh masyarakat dalam kebijaksanaan pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan, diantaranya ialah terwujudnya rasa aman, nyaman, dan kelancaran dalam berlalu lintas serta dapat meminimalisir kemacetan dan kecelakaan. Namun meskipun Peraturan Daerah tersebut sudah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara, masih didapati beberapa kekurangan sehingga dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut menjadi kurang optimal. Seperti masih didapati rambu lampu lalu lintas yang tidak dirawat secara berkala yang mana hal ini disebabkan oleh adanya keterbatasan anggaran dana yang menjadikan kegiatan perawatan maupun pengadaan manajemen lalu lintas jalan menjadi terhambat.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah* terkait implementasi Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Pelaksanaan Manajemen Lalu Lintas Jalan dapat dikatakan sudah sesuai dengan ketentuan *Fiqh Siyasaah Tanfidziyyah*. Dikatakan demikian karena kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung

Utara yakni terkait manajemen lalu lintas jalan merupakan salah satu upaya pemerintah dalam menjaga kemaslahatan rakyat, hal ini dapat dilihat dengan tersampainya manfaat atau dampak positif yang ditimbulkan dari adanya pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kepada masyarakat atau pengguna jalan. Namun dalam segi proses pelaksanaan masih terdapat kekurangan diantaranya masih didapatinya kekurangan pada mesin elektronik dan kondisi rambu lampu lalu lintas yang perlu diadakan pengecatan dan perawatan ulang guna meningkatkan sistem dan fungsi daripada rambu lampu lalu lintas itu sendiri. Serta kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan kepada masyarakat pengguna jalan tentang pentingnya taat berlalu lintas, sebagaimana kaidah *Fiqh Siyasah* yaitu ditegaskan bahwa setiap segala sesuatu yang bentuknya kemudharatan harus segera dihilangkan dari kehidupan masyarakat. Sehingga menjadi tugas penting Dinas Perhubungan agar dapat mencari solusi serta tindakan yang harus dilakukan terkait kekurangan tersebut.

B. Rekomendasi

Berdasarkan pada pembahasan di atas, terdapat beberapa hal yang dapat penulis sarankan, diantaranya sebagai berikut:

1. Untuk pemerintah daerah kabupaten lampung utara, khususnya Dinas Perhubungan yang menaungi terkait pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan. Sebagai bentuk upaya agar dapat terciptanya ketertiban dan keselamatan bagi pengguna jala yang lebih optimal, hendaknya Dinas Perhubungan kabupaten lampung utara dapat memberikan wadah khusus bagi masyarakat sekitar untuk menampung berbagai macam aduan dan kritikan terkait situasi rambu lalu lintas sebagai bentuk kerjasama dengan para pengguna jalan.
2. Untuk pemerintah daerah kabupaten lampung utara, khususnya Dinas Perhubungan agar dapat melakukan sosialisasi atupun memberikan himbauan sesering mungkin baik kepada para pelajar maupun pada pengguna jalan lainnya

baik itu saat melaksanakan pengaturan lalu lintas maupun melalui rekaman suara yang diperdengarkan di lokasi lampu lalu lintas terkait tentang betapa pentingnya akan tertib berlalu lintas guna menjaga keselamatan jiwa. Serta lebih meningkatkan hubungan kerjasama baik itu dengan pihak swasta dan pemerintah terkait lainnya agar dapat mempercepat proses pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan baik itu dari segi anggaran maupun pelaksanaannya.

3. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan penelitian tentang pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan kiranya dapat dikaji lebih mendalam lagi dengan permasalahan yang berbeda. Hal ini tentunya bertujuan untuk meningkatkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan.



DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Willya. *Pengembangan Masyarakat Berbasis Komunitas*. Surabaya: Cipta Media Nusantara, 2022.
- Ahmad Saebani, Beni. *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- . *Fiqh Siyasah Terminologi Dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad Saw. Hingga Al-Khulafah Ar-Rasyidin*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2015.
- Al-Aziz, Abdul Syukur. *Sejarah Peradaban Islam Menelusuri Jejak-Jejak Peradaban Di Barat Dan Di Timur*. Yogyakarta: al-Saufa, 2014.
- Andi Bastoni, Hepi. *Sejarah Para Khalifah*. Bogor: Pustaka Al-Kausar, 2009.
- Andi, Rianto. *Metode Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Anggito, Albi and Johan Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jawa Barat: CV Jejak, 2018.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- . *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Asdar. “Manajemen Penanggulangan Kemacetan Lalu Lintas Di Dinas Perhubungan Kota Makasar,” n.d.
- Azizah, Auliya Nurul, Anton Budiharjo, and Siti Maimunah. “KAJIAN MANAJEMEN LALU LINTAS DI KAWASAN PASAR BOGOR” 23, no. 1 (2022).
- Data Dinas Perhubungan Lampung Utara 2024*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1990.
- Djazuli, H.A. *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*. Jakarta: Prenada Media Group, 2003.

———. *Kaidah Fiqh: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana, 2011.

Dokumentasi. *Profil Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara*, <https://dishub.lampungutarakab.go.id>.

———. *Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara*, <https://dishub.lampungutarakab.go.id>.

———. *Tugas Dan Fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara*, <https://dishub.lampungutarakab.go.id>.

Gie, The Liang. *Pertumbuhan Daerah Pemerintahan Daerah Di Negara Kesatuan Republik Indonesia Jilid III*. Jakarta: Gunung Agung, 1995.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Riset*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Hardi Selaku Danru Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kabupaten Lampung Utara,, Pada 15 Maret 2024 Pukul 09.30-11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Idrus Selaku Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Pada 18 Maret 2024 Pukul 10.00-11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Meidian Putera, A.Ma.PKB Selaku Seksi Pengawasan Dan Pengendalian Lalu Lintas, Pada 15 Maret 2024 Pukul 09.30-11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Nur Aidi, S.E. Selaku Kasi Pembinaan Dan Pengembangan Fasilitas Lalu Lintas, Pada 15 Maret 2024 Pukul 09.30-11.00 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Teddy Selaku Pegawai Bagian Lalu Lintas, Pada 18 Maret 2024 Pukul 09.00-09.30 WIB.

Hasil Wawancara Dengan Bapak Wahyu Selaku Masyarakat Kabupaten Lampung Utara, Pada 18 Maret 2024 Pukul 10.00-11.00 WIB.

Hermanto, Agus. *Fikih Ekologi*. Malang: Literasi Nusantara, 2018.

Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.

———. *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

- Margono, S. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2004.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005.
- M.S, Kaelan. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Pradigma, 2005.
- Novia, Rahma, Moch. Saleh Soeaidy, Minto Hadi. “PERANAN DINAS PERHUBUNGAN DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN MASYARAKAT DI BIDANG ANGKUTAN KOTA” 1, no. 7 (n.d.): 1296–1304.
- Nurdin, Abidin, Bustami Usman, Fauzan Samad, and Mukmunzir Mukhtar. “Tujuan Hukum Islam Untuk Kemaslahatan Manusia : Penerapan Kaidah Fiqhiyah Dalam Bidang Ekonomi Dan Hukum Keluarga.” *Jurnal Hukum Keluarga* 5 (January 1, 2022).
- Nurdin, Ismail. *Etika Pemerintahan Norma, Konsep, Dan Praktek Bagi Penyelenggaraan Pemerintahan*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2017.
- Nurrahman, Agung. “PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEMELIHARA KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (STUDI PADA PENANGANAN PENYEBARAN VIRUS COVID 19 DI PROVINSI DKI JAKARTA).” *Jurnal Tatapamong*, March 30, 2020, 1–16. <https://doi.org/10.33701/jurnaltatapamong.v2i1.1232>.
- Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Manajemen Lalu Lintas Jalan*.
- Praja, Juhaya S. *Pemikiran Ketatanegaraan Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010.
- Priyono, Broto, Chairul Insani Ilham, Muhammad Fathoni, and Bambang Setiawan. *Pengelolaan Angkutan Sungai, Danau Dan Penyebrangan*. Jawa Barat: CV. Adanu Abimata, 2021.
- Pulungan, J. Suyuthi. *Fiqh Siyash: Ajaran Sejarah Dan Pemikiran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.

- Qardhawi, Yusuf. *Norma Dan Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 2009.
- R.A Ekie Prifitriani Ramona. “EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN BERLALULINTAS DI KALANGAN ANAK REMAJA KABUPATEN MAROS,” 2014.
- Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press, 2007.
- Ridwan, Mohammad. *WAWASAN KEISLAMAN Penguatan Diskursus Keislaman Kontemporer Untuk Mahasiswa Perguruan Tinggi Umum*. Yogyakarta: Zahir Publishing, 2020.
- Risdiyanto. *Rekayasa Dan Manajemen Lalu Lintas Teori Dan Aplikasi*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera, 2014.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rustam, Muhammad Syarif Prasetia Adiguna, et al. *REKAYASA LALU LINTAS*. Tahta Media Group, 2023.
- Sarwoko, Iwan, Slamet Widodo, and Gusti Zulkifli Mulki. “MANAJEMEN DAN REKAYASA LALU LINTAS PADA SIMPANG JALAN IMAM BONJOL – JALAN DAYA NASIONAL DI KOTA PONTIANAK” 17 (2017).
- Setiawan, Guntur. *Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka, 2004.
- Sholihin, Bunyana. *Metodologi Penelitian Syari'ah*. Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2020.
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Supranto, J. *Metodologi Peramalan Kuantitatif: Untuk Perencanaan Ekonomi Dan Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2010.
- Syah, Ismail Muhammad. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- Syarif, Mujar Ibnu and Khamal Zana. *Fiqh Siyash Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

- Toha, Miftah. *Pembinaan Organisasi (Proses Diagnosa Dan Intervensi)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Waliyul Ahdi. “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN,” 2019.
- Yoki Pradikta, Hervin and M. Edward Rinaldo. “Analisis Fiqh Siyasah Dusturiyah Dalam Pembentukan Peraturan Tentang Trading in Influence Dalam Hukum Positif Di Indonesia,” *Jurnal As-Siyasi* Vol 1, no. 1 (2021), <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Yoki Pradikta, Hervin and Rindy Mustika. “Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Penyandang Disabilitas Perspektif Fiqh Siyasah,” *Jurnal As-Siyasi* Vol 1, no. 2 (2022), <https://ejournal.radenintan.ac.id>.
- Yusdani. *Fiqh Politik Muslim Doktrin Sejarah Dan Pemikiran*. Yogyakarta: Amara Books, 2011.
- Zada, Khamami. *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Erlangga, 2008.

